

BAB II

GEJOLAK ABU SAYYAF DAN SEPAK TERJANG SURYA PALOH

Pada Bab II ini, peneliti akan membahas tentang gambaran umum yang akan diteliti. Mulai dari pergerakan dan perkembangan Kelompok Abu Sayyaf yang menjadi penyandera 10 WNI di Filipina hingga perjalanan karis Surya Paloh yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia maupun mancanegara dengan adanya aksi klaim atas Tim Kemanusiaan Surya Paloh yang didalamnya merupakan anggota dari Media Group meliputi Yayasan Sukma dan Partai NasDem. Kelompok Abu Sayyaf ini sudah menjadi buah bibir di belahan dunia lewat aksi kriminalnya. Tak jarang korban dari Abu Sayyaf kehilangan nyawanya, apabila tebusan yang diminta tidak dipenuhi maka mereka tidak ragu untuk memenggal kepala para sandernya. Selain menyoroti lebih jauh tentang pergerakan dari Abu Sayyaf, peneliti juga akan menjelaskan perkembangan kariir seorang Surya Paloh baik dalam dunia politik maupun bisnis media yang dipegangnya.

Aksi klaim dari Tim Kemanusiaan Surya Paloh ini menyeret Yayasan Sukma yang ia bangun ketika terjadinya Tsunami di Aceh. Pada saat itu, Metro Tv menggalang dana untuk korban bencana alam di Aceh dan siapa yang menyangka kalau dana yang didapatkan melalui rekening Metro Tv tersebut meledak dan melampaui jumlah yang dibutuhkan. Dengan berlebihnya dana tersebut maka Paloh berinisiasi untuk membangun sekolah bagi warga Aceh yang pada saat itu membutuhkan pendidikan karena mengingat mereka baru saja tertimpa bencana. Keikutsertaan Yayasan Sukma dalam membantu pemerintah Indonesia membebaskan sandera ini berkaitan dengan Surya Paloh yang mejadi pimpinan mereka di Media Group. Surya

Paloh menggagas ide yang kemudian dilanjutkan oleh orang-orang yang ia percayai untuk terlibat dalam aksi membebaskan 10 WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf di Filipina.

A. Kelompok Teroris Maritim Abu Sayyaf

Filipina adalah negeri kepulauan yang terdiri dari 7.109 pulau tropis dengan total luas wilayah 29.629.000 hektar dan terdiri dari berbagai ragam etnis, bahasa dan agama. Meskipun lebih dikenal sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya menganut Katholik, wilayah Filipina sekarang ini meliputi beberapa kawasan yang berpenduduk muslim. Komunitas muslim sangat penting bagi perkembangan sosial dan politik Filipina, masyarakat Islam di Filipina juga seringkali disebut bangsa Moro. Menurut catatan sejarahnya, istilah Moro merujuk kepada kata Moor, Moriscor atau Muslim (Ibrahim, 2009: 267).

Kata Moor berasal dari istilah Latin Mauri, sebuah istilah yang seringkali digunakan orang-orang Romawi Kuno untuk menyebut penduduk wilayah Aljazair Barat dan Maroko. Istilah moro digunakan untuk menamakan penduduk pribumi Filipina yang beragama Islam. Sedangkan istilah India merupakan sebutan bagi kaum pribumi Filipina yang menjadi Kristen. Sedangkan kaum yang menyembah berhala dan berdiam di pedalaman dan gunung-gunung disebut infieles (Ibrahim, 2009: 267-268).

Pada tahun 1935, Persemakmuran Filipina terbentuk sebagai hasil kesepakatan perjanjian antara AS dan Manuel Quezon (Presiden Filipina terpilih 1935-1944) menyatakan kepada masyarakat Moro bahwa mereka para sultan dan datuk tidak lagi memiliki tempat dalam pemerintahan baru ini dan hukum nasional akan diberlakukan kepada setiap warga negara tanpa melihat agamanya. Pernyataan Quezon itu menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Moro yang selalu menganggap diri mereka sebagai bangsa yang berdiri sendiri. Juli 1946, tuntutan untuk berdiri sendiri sebagai sebuah negara tidak terwujud (Ibrahim, 2009: 273).

Diskriminasi pemerintah Filipina terus terjadi kepada bangsa Moro di tahun 1950-an dan 1960-an, mereka membuat program yang dinilai oleh penduduk muslim sebagai upaya pemerintah untuk menghancurkan komunitas muslim Filipina. Akibat dari kejadian tersebut muncul tokoh muda yang menolak status quo dan gagasan pemisahan diri dari negara Filipina. Mereka adalah Datu Utdog Matalam dan Nur Misuari, yang kemudian mendirikan MNLF (Moro National Liberal Front) atau Front Pembebasan Nasional Moro pada tahun 1969 dengan tujuan menuntut kemerdekaan wilayah Mindanao dari pemerintah Filipina (Ibrahim, 2009: 275).

Perjuangan masyarakat Moro pada tahun 1970-an telah dimulai dengan gerakan bersenjata, perpecahan terjadi di kalangan pimpinan MNLF, Marcos terus mendekati kelompok muslim yang dapat diajak bekerjasama, dan menyatakan "hak otonomi" atas dua wilayah, yaitu Sulu dan Mindanao Barat serta Mindanao Tengah. Karena adanya perbedaan visi dan orientasi perjuangan, MNL (Moro National Liberation) yang tadinya diharapkan menjadi induk gerakan pembebasan bangsa Moro akhirnya pecah. Muncul dua kelompok, yakni kelompok nasionalis-sekuler pimpinan Nur Misuari yang mendirikan Moro National Liberation Front (MNLF) dan kelompok Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang dipimpin oleh Hashim Salamat. Dalam perjalanannya, MNLF pun akhirnya terpecah lagi dengan munculnya kelompok MNLF Reformis di bawah pimpinan Dimas Pundato (1981) dan pada tahun 1993 lahir kelompok Abu Sayyaf di bawah pimpinan Abdulrazaq Janjalani (Ibrahim, 2009: 277-278).

Abdulrazaq memberikan penjelasan tujuan didirikannya Abu Sayyaf, "Empat Dasar Kebenaran" yang diterbitkannya sebagai panduan dasar bagi kelompok Abu Sayyaf:

- a. Tujuan kami tidak untuk membangun atau mempromosikan faksi dan perpecahan dalam perjuangan muslim, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan dari

kelompok ini untuk menjadi jembatan antara pasukan revolusioner baik dari MNLF dan MILF yang peran dan kepemimpinannya dalam perjuangan ini tidak dapat diabaikan.

b. Tujuan strategis utama kami adalah pembentukan sebuah negara Islam murni yang “sifat, makna, lambang dan tujuannya” identik dengan kedamaian. Kelompok Abu Sayyaf menyatakan bahwa mereka akan menghormati kebebasan beragama, bahkan dalam konteks sebuah negara Islam, mereka menyatakan “hak-hak orang Kristen akan dilindungi selama mereka mematuhi hukum negara Islam”.

c. Advokasi melalui tindakan peperangan merupakan kebutuhan selama tetap terjadi “penindasan, ketidakadilan dan klaim yang sewenang-wenang” terhadap umat Muslim

d. Peperangan mengganggu perdamaian hanya untuk mencapai tujuan yang benar dan nyata akan nilai kemanusiaan, dalam penegakan keadilan dan kebenaran untuk semua di bawah naungan hukum Quran yang mulia dan Sunnah yang murni. Adanya ketidakadilan struktural serta perampasan ekonomi dari Bangsa Moro, yang pada akhirnya upaya penegakan keadilan akan berakhir pada sebuah tuntutan untuk mendirikan negara Islam yang murni sebagai jaminan keadilan dan kemakmuran bagi muslim Bangsa Moro (Siregar, 2016: 4-5).

Pasca sepeninggalan Abdurajak Janjalani, Abu Sayyaf dipimpin oleh Khadafi Janjalani (saudara Abdurajak Janjalani) dengan tujuan yang sama yakni mendirikan negara Islam yang merdeka. Namun pada masa kepemimpinannya gerakan ini terpecah ke dalam beberapa faksi yang berbeda, kegiatannya tidak lagi memperjuangkan dan melindungi hak umat Muslim di Filipina Selatan tetapi lebih kepada kegiatan kriminalitas seperti perampokan, pengeboman, dan penculikan (Pujayanti, 2016: 6)

Abu Sayyaf juga dikenal sebagai Al Harakat Al Islamiyya yang bermarkas di Mindanao Barat, Filipina Selatan. Kelompok ini mendeklarasikan Mindanao Barat sebagai negara Islam

Merdeka dan menentang kesepakatan damai dengan Pemerintah Filipina di tahun 2012. Dengan semakin ketatnya tekanan militer Filipina, kelompok tersebut mulai mengalami kesulitan pendanaan sehingga melakukan aksi penculikan dengan uang tebusan untuk mendanai kegiatan mereka. Penculikan turis asing di resor-resor wisata pantai dan warga sipil lainnya dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal cepat di perairan wilayah Pulau Basilan, Mindanao, Jolo, Tawi-Tawi dan pantai timur Sabah. Kelompok Abu Sayyaf dan simpatisannya memiliki sejarah panjang dalam aksi terorisme maritim (Pujayanti, 2016: 7)

Diantaranya pengeboman MV Doulos pada 1991 di Zamboanga City, peledakan kapal penumpang Superferry 14 pada 2004 di Teluk Filipina, dan pada 6 Mei 2014 menculik pengusaha peternakan ikan di P. Baik, Sabah. Pada 15 Mei 2015 dua orang juga diculik dari resor di Sandakan, Sabah. Satu orang tewas terpenggal karena negosiasi gagal dan lainnya dibebaskan. Di tahun 2016, selain membajak dan menyandera ABK kapal Brahma 12, Anand 12, dan Massive 6, mereka juga menculik turis Tiongkok dan pekerja Filipina dari resor di Semporna, Sabah. Keduanya dibebaskan pasukan Malaysia dan Filipina. Mereka juga lebih terlatih dan terorganisasi dalam bertindak dengan aksi-aksi teror. Belakangan terkuak bahwa Abu Sayyaf memiliki ideologi baru yang menyatakan bahwa mereka adalah suatu gerakan radikal dan akan menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya (Pujayanti, 2016: 7).

Aksi terorisme Abu Sayyaf, selain bermotif finansial juga berlandaskan perlawanan yang sifatnya politik ideologis, sehingga membutuhkan penanganan yang hati-hati. Pada saat itu pemerintahan Indonesia terus berupaya untuk membebaskan ke 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf tersebut tanpa tunduk pada tuntutan pembayaran uang tebusan. Masyarakat muslim Moro di Filipina terus menunjukkan dinamika beragama dan bermasyarakat kendati dalam situasi yang

tidak menentu. Mereka terus meningkatkan usaha pendidikan. Hubungan dengan dunia Islam dan gerakan dakwah internasional maupun regional terus dikembangkan (Ibrahim, 2009: 288).

B. Surya Paloh : Kuasa Media & Politik

1. Biografi & Karir Politiknya

Surya Paloh adalah pria kelahiran Aceh anak dari perwira polisi asal Sumatera Utara yaitu Muhammad Daud Paloh. Surya Paloh adalah pendiri sekaligus ketua gerakan anti Soekarno dan anti Komunis Komite Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) cabang Medan pada tahun 1966. Sebelum Pemilihan umum 1971, ia sempat bergabung sebagai aktivis Golkar dan menjadi koordinator kampanye Golkar di Sumatera Utara dan Aceh untuk pemilihan umum 1977. Pada masa itu ia dekat dengan sejumlah tokoh senior Golkar, termasuk Adam Malik yang ketika itu Wakil Presiden Indonesia. Setelah pemilihan umum 1977, 1982 dirinya ditunjuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan beliau merupakan anggota termuda pada saat itu. Ia pun pindah ke Jakarta dan ia langsung mengetuai Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) dalam waktu beberapa bulan saja. Selaku pendiri Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI), kelompok lobi berpengaruh yang beraliansi dengan tentara, ia berhubungan erat dengan sejumlah keluarga paling berkuasa di negeri ini (Hill, 2011:109).

Tak berselang lama dari Surya Paloh menjadi ketua FKKPI, dirinya terpilih menjadi Ketua Koordinator Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Golkar, ia juga pernah menjadi Ketua Umum Golkar di Medan. Pada tanggal 19 Desember 2004 Jusuf Kalla terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 dalam Musyawarah Nasional di Nusa Dua Bali. Kalla pada saat itu memberikan kepercayaan kepada Paloh untuk menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar. Menjelang pemilu 2009, anggota yang menjadi pentolan Partai Golkar

pada waktu itu mengundurkan diri dan ingin membuat partai sendiri yaitu; Wiranto yang ingin membentuk partai baru dan diberi nama Hanura (Hati Nurani Rakyat), kemudian disusul Prabowo Subianto yang membuat partai baru dengan nama Gerindra (Gerakan Indonesia Raya). Munas Golkar pada tahun 2009 yang diselenggarakan di Pekanbaru Riau, menjadi saksi pertarungan antara Surya Paloh dan Aburizal Bakri yang pada hasil akhirnya dimenangkan oleh ARB singkatan dari Aburizal Bakrie. Dalam pemilihan itu, Surya Paloh hanya mendapatkan 240 suara, sedangkan Aburizal Bakrie mendapatkan 260 suara. Paloh menilai bahwa musyawarah berjalan dengan tidak baik, ia juga memaparkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan munas dan ia merasa adanya tekanan dan intimidasi dari beberapa pihak ke anggota partai lainnya (Wibowo, 2009).

Pasca kemenangan Aburizal Bakrie pada tanggal 1 Februari 2010, Surya Paloh menggebrak panggung dinamika politik dan mengajak puluhan tokoh serta politisi nasional untuk mendeklarasikan sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang diberi nama Nasional Demokrat. Paloh bersama Sri Sultan Hamengkubowono X mencetuskan pendirian ormas tersebut, yang dideklarasikan pada 1 Februari 2010 di Gedung Istora Senayan Jakarta dengan tujuan mewujudkan Restorasi Nasional. Dalam pidatonya, Paloh mengatakan bahwa ormas yang memiliki slogan “Restorasi Indonesia” tersebut tidak ada kaitannya dengan partai perpolitikan. Pada didirikannya Ormas NasDem, Paloh masih berada di Partai Golkar dan menyebutkan bahwa ormas ini nantinya menjadi lahan magang bagi anggota Partai Golkar untuk mendapatkan pengalaman lebih banyak. Seragamnya biru, orang-orangnya kuning. Pengamat politik dari lembaga Survei Indonesia yaitu Burhanuddin Muhtadi, melihat bahwa Nasional Demokrat adalah eksperimen politik Surya Paloh, yang memformatnya menjadi ormas (Amri, 2010).

Tak berselang lama, ormas Nasional Demokrat ditinggalkan oleh inisiatornya yaitu Sri Sultan Hamengkubowono X, disusul oleh beberapa deklaratornya yang mengundurkan diri; seperti Khofifah Indarparawansa, Anies Baswedan, Amad Syafii Maarif, Didik J. Rachbini, dan Budiman Sudjatmiko, serta pengurus lainnya yang merasa kecewa karena ormas tersebut berubah menjadi partai politik yang tentunya akan berorientasi kepada kekuasaan. Setelah keluar dari NasDem, Sri Sultan kembali bergabung menjadi fungsionaris Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie

Melalui website resmi partainasdem.id, dijelaskan bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, ormas NasDem resmi lahir sebagai partai politik baru. Untuk mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai NasDem dideftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia pada bulan Maret 2011. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa dipisahkan dari misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Setelah melakukan verifikasi administrasi atas 34 parpol yang berniat ikut Pemilu 2014, KPU menyatakan ada 16 partai yang lolos maju ke tahap verifikasi faktual.

Senin 7 Januari 2013 merupakan hari yang mendebarkan bagi Partai NasDem, pasalnya hari itu adalah pengumuman yang menyatakan bahwa Partai NasDem lolos dalam memenuhi persyaratan verifikasi faktual tingkat pusat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Setelah mendapat pengakuan oleh negara atas status baru partai yang diusungnya, Surya Paloh akhirnya memutuskan untuk keluar dari Partai Golkar dan mulai fokus kepada partai barunya. Lolosnya partai NasDem menjadi perhatian bagi publik, terutama bagi partai politik lama. NasDem sebagai partai yang baru, dinilai terlalu dini untuk menjadi partai politik di Indonesia, hanya dalam rentang waktu dua tahun yakni dari 2011

hingga 2013, NasDem mampu mentransformasikan diri sebagai partai politik Indonesia yang berbadan hukum.

Awal terbentuknya kepengurusan Partai NasDem, Surya Paloh menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem. Sedangkan untuk jabatan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menggandeng Patrice Rio Capela (mantan politisi partai PAN yang pernah menjabat sebagai ketua DPW PAN), Patrice hanya berhasil memimpin partai tersebut hingga menuju kongres pertama Partai NasDem yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Januari 2013. Hasil dari keputusan kongres pada saat itu menjadi tonggak baru perjalanan Partai NasDem, salah satunya adalah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018. Dalam kongres tersebut, Surya Paloh diberi mandat untuk menyusun kepengurusan dan perangkat partai. Pada proses pergantian Ketua Umum Partai NasDem, polemik internal justru melanda partai tersebut. Banyaknya perbedaan pendapat dan visi misi para anggotanya menimbulkan banyak permasalahan di dalam partai NasDem yang pada akhirnya membuat banyaknya anggota yang keluar masuk.

Sebelum Kongres I Partai NasDem digelar, lebih dari seratus kader mengundurkan diri ketika mendengar Surya Paloh akan dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai NasDem. Keluarnya ratusan kader tersebut disinyalir menjadi aksi kekecewaan para pendukung NasDem yang bergabung dalam kubu Hary Tanoe. Pada saat itu, Hary Tanoe menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar NasDem. Lain halnya dengan Hary Tanoe, Patrice Rio Capella menyatakan legowo apabila jabatannya sebagai Ketua Partai NasDem akan digantikan oleh Surya Paloh, karena ia merasa tak bisa berbuat banyak dan tidak mempunyai pilihan lain (Andrian,2013).

Dilansir dari nasional.kompas.com, mundurnya Hary Tanoe yang memiliki peran penting untuk bisa mendukung Surya Paloh lewat media yang ia miliki ini menjadi buah bibir masyarakat Indonesia menjelang Kongres I Partai NasDem. Hary Tanoe tidak bertahan lama di Partai NasDem karena ia merasa adanya perbedaan pendapat antara dirinya dan Surya Paloh. Hary Tanoe menjelaskan bahwa ia merupakan salah seorang yang ikut meloloskan verifikasi Partai NasDem mendapatkan legalitasnya. Berhembus kabar bahwa, di dalam tubuh Partai NasDem terdapat dua faksi yang berkubu pada Hary Tanoe dan Surya Paloh, mendengar bahwa Surya Paloh yang akan naik menjadi Ketua Umum Partai NasDem maka, Hary Tanoe menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pakar Partai NasDem kala itu.

Hengkangnya Hary Tanoe dan kawan-kawan yang berada dalam faksinya ketika di Partai NasDem dipicu oleh ambisi Surya Paloh yang mengincar jabatan Ketua Umum, sementara Hary dan pendukungnya menginginkan Partai NasDem dipimpin oleh kalangan generasi muda. Ketika Hary Tanoe mengundurkan diri, para pengikutnya juga berbondong-bondong mengundurkan diri karena pemimpin yang dianggap mereka mampu berada di posisi tersebut digantikan oleh orang lain.

Dalam tulisan Adrian di Jurnal Politik ternama, ia menjelaskan bahwa selama perjalanan karir politik Partai NasDem ini ada, mereka tidak memiliki *platform* yang kuat. Para kader hanya masuk ke partai tersebut karena ada salah seorang tokoh yang ia jadikan *trend center* yang kemudian para pengikut setianya ikut bergabung ketika sang tokoh itu berada di instansi tersebut. Artinya, Partai NasDem belum memiliki pondasi yang kuat untuk mencari kader yang murni berkarir di dunia politik bersama dengan visi dan misi dari Partai NasDem. Taktik Surya Paloh boleh dikatakan cukup bagus, karena setiap kader yang masuk ke Partai NasDem dan dianggapnya dapat berpengaruh besar akan diberikan jabatan yang bagus pula, yang nantinya

apabila para aktor politik tersebut keluar maka anggota-anggota dari Partai NasDem yang berada di sisi Paloh akan mengambil ilmu dari pengalaman yang sebelumnya.

Dalam tulisannya tersebut Adrian juga menilai ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap suatu partai politik masih harus dipertanyakan, apakah mereka bergabung demi memperjuangkan kepentingan konstituen politiknya atau hanya mencari popularitas dan mendapatkan penghasilan tetap yang cukup sebagai anggota partai besar di Indonesia, terlebih lagi apabila ia sudah terpilih menjadi anggota dewan. Posisi Ketua Umum Surya Paloh tentunya menjadi target calon Presiden RI, namun ia kehilangan pendukung terbesarnya yaitu Hary Tanoe. Padahal ia bisa lebih dikenal masyarakat lewat medi ayang dimiliki Hary Tanoe dan pastinya hal tersebut menjadi berita yang akan menaikkan popularitas Surya Paloh kepada masyarakat Indonesia. Saat ini Surya Paloh fokus membuat Partai NasDem menjadi populer dan eksis sebagai partai politik, salah satunya lewat aksi tim penyelamatan yang diberi nama Tim Kemanusiaan Surya Paloh yang tak lain kader Partai NasDem juga turt berecimpung di dalamnya dengan tujuan menaikkan popularitas mereka di mata masyarakat Indonesia.

2. Sang Pemilik Media Group

Banyaknya pengalaman Surya Paloh di dunia poltik menyadarkan dirinya bahwa, untuk bisa bertahan di dunia perpolitikan maka ia harus memiliki uang yang cukup guna membiayai segala kebutuhan partainya. Awal kesuksesannnya sebagian besar dimulai dari keberhasilan katering miliknya, PT Indocater. Makin lama prestasi bisnisnya semakin berkilau berkat koneksinya dengan sederetan tokoh berpengaruh. Beberapa kali Surya Paloh terlihat bersama Bambang Trihatmojo, putra presiden yang memegang konglomerasi Bimantara. Surya Paloh

sendiri kemudian menjalin hubungan dengan direktur Bimantara Posano Barack lewat jalur perkawinan (Hill, 2011:109).

Dari bisnis catering, Surya Paloh mendirikan PT Surya Persindo, perusahaan induk yang bergerak di bidang penerbitan. Perusahaan ini yang memproduksi Prioritas, harian kontroversional bergaya cukup gemerlap dan tanpa tedeng aling-aling. Awalnya harian ini dicetak PT Sinar Agape Press milik Sinar Harapan yang sekaligus memberikan bantuan teknis soal tata letak. Surya Paloh kemudian menarik dua jurnalis senior Sinar Harapan, Panda Nababan dan Derek Manangka, menjadi Wakil Redaktur Umum dan Redaktur Pelaksana Prioritas. Sebagai harian Indonesia pertama yang menampilkan foto-foto berwarna di halaman depan dan belakang Prioritas menandai perubahan yang terjadi dalam industri pers (Hill, 2011: 109-110).

Kedekatannya dengan jajaran elite politik tidak lantas membuat Prioritas kebal bredel. Pada tanggal 29 Juni 1987 Prioritas menjadi surat kabar kedua yang dicabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau disingkat SIUPP, dalam surat perintah pembatalan izin terbit itu, Prioritas dianggap sering memuat kabar yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta beritanya bernuansa sinis, mengarah dan tendensius. Surat tersebut juga menyatakan bahwa Prioritas melenceng dari apa yang tertera dalam SIUPPnya yang menggariskan harian tersebut menurunkan 75 persen beritanya untuk masalah-masalah ekonomi dan 25 persen sisanya untuk berita umum. Namun nyatanya, banyak yang meyakini bahwa surat kabar ini dibredel karena secara terbuka membahas berbagai kasus korupsi dan dengan akurat prediksi sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah dengan cara sedemikian rupa. Sejumlah kabar menduga bahwa awalnya Menteri Penerangan Harmoko tertarik untuk memiliki sebagian saham Prioritas. Namun karena Surya Paloh menolak, maka sang menteri akhirnya jengkel terhadap surat kabar tersebut berikut dan penerbitnya (Hill, 2011: 110).

Setelah Prioritas dibredel, pada bulan Agustus 1987 Surya Paloh mengajukan permohonan SIUPP baru untuk surat kabar bernama sementara Realitas. Permohonannya tersebut ditolak dengan dalih pasar tidak lagi menerima “harian umum”. Hingga lebih dari lima tahun sudah pengajuan permohonan surat izin tersebut dilayangkan, namun tak kunjung juga disetujui. Di saat yang sama, beberapa harian umum lainnya diberikan surat izin (termasuk Republika yang bergenre Islami), hal ini tentunya membingungkan para awak di Prioritas (Hill,2011:110).

Tak berputus asa, pada bulan Januari 1988 Surya Paloh bekerjasama dengan penerbit majalah hiburan yaitu Vista. Setelah menyuntikkan dana segar sejumlah Rp 11,5 miliar dan mempekerjakan 40 mantan staf Prioritas, Surya Paloh berhasil membangkitkan kembali dan menghidupkan terbitan yang kemudian berubah menjadi Vista TV (Hill, 2011: 111).

Setelah dua belas tahun mengambil alih Vista TV, Ia masih belum juga mengantongi izin SIUPP untuk surat kabar terbarunya. Ia pun kembali memiliki jalan keluar yaitu dengan bekerjasama menjadi rekan penerbit Media Indonesia, yang dimiliki Teuku Yousli Syah sudah berdiri sejak tahun 1969 dan kebetulan pada saat itu surat kabar tersebut sedang dalam masa krisis. Surya Paloh pun datang untuk memberikan kehidupan pada harian tersebut dengan penanaman modal dari PT Surya Persindo. Setelah diluncurkan pada tanggal 11 Maret 1989, harian ini meningkat dengan pesat dan pasti. Media Indonesia menantang mereka yang selama ini memimpin pasar dengan basis pelanggan lewat strategi promosinya, secara agresif Media Indonesia membuat starategi penjualannya di jalan-jalan ketimbang mengantarkan ke rumah-rumah pelanggan. Harian ini juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan taksi dengan menyediakan Media Indonesia gratis untuk dibaca para penumpang. Hanya dalam jangka waktu 20 bulan, surat kabar ini melewati titik balik dari yang sebelumnya, sempat mendapatkan

peringatan Departemen Penerangan karena memuat artikel pada tanggal 23 Maret 1990 yang membandingkan Presiden Soeharto dengan Pharaoh (Hill,2011:111). Pada tahun 1989-1990 dengan cepat Surya Paloh dan Surya Persindo melakukan diversifikasi ke penerbitan daerah, diantaranya;

Tabel 2.1

Kepemilikan Surat Kabar Surya Paloh di beberapa Daerah (Hill,2011:112).

10 Penerbitan Daerah
1. Harian Aceh Pos dan Mingguan Peristiwa dan di Banda Aceh
2. Harian Mimbar Umum di Medan
3. Harian Semangat di Padang
4. Sumatera Express di Palembang
5. Harian Lampung Post di Bandar Lampung
6. Harian Gala di Bandung
7. Harian Yogya yang dulu bernama Masa Kini di Yogyakarta
8. Harian Dinamika Berita di Pontianak
9. Harian Cahaya Siang di Manado
10. Harian Nusa Tenggara yang lebih dikenal dengan Nusa di Bali

Upaya Surya Paloh menggalang jaringan surat kabar nasional lebih merupakan kobaran kegairahan ketimbang pertimbangan ekspansi seperti yang dilakukan kelompok pers lainnya. Namun pada tahun 1990-an, Surya Paloh terkena imbas dari kelesuan ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan perampangan pada perusahaan tersebut. Akhir tahun 1992 ditandai dengan

ditutupnya sejumlah koran daerah seperti Semangat, Yogya Post, Nusa Tenggara dan dari harian menjadi mingguan yaitu Gala (Hill, 2011: 113-114).

Sempit luasnya ruang lingkup yang tersedia bagi pers akan menentukan seluas apa yang dimiliki oleh pers. Terkekangnya kebebasan pers ditandai dengan sempitnya ruang lingkup yang ada. Sebaliknya, ruang lingkup yang luas merupakan pertanda adanya kebebasan pers. Hubungan antara pemerintah Indonesia dan pers akan membentuk ruang lingkup itu. Pemerintah yang otoriter akan mempersempit ruang gerak pers karena keterbukaan dianggap bisa memperlemah kedudukan penguasa, sementara itu negara yang berlandaskan demokrasi akan senantiasa menjaga ruang lingkup tersebut agar tetap terpelihara (Harahap, 2000:222).

Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan sempitnya ruang lingkup yang dimiliki oleh pers. Pada masa Demokrasi Terpimpin, semua media diharuskan menjadi alat pemerintah yang mewajibkan mereka untuk menjadi pendukung dan pembela Manifesto Politik, apabila mereka tidak bersedia maka pemerintah tidak akan memberikan izin terbit. Pada masa ini, Presiden Soekarno dengan tegas menolak adanya kebebasan pers dan ia terlihat jelas membuat garis pemisah antara mereka yang mendukung pemerintahannya dan yang menentangnya. Ruang lingkup yang sempit tersebut terus berlangsung hingga masa Orde Baru. Jargon-jargon yang bertolak belakang dengan kenyataan seperti “interaksi yang positif antara pers-pemerintah dan masyarakat” terus dikumandangkan. Kehidupan pers pada masa Orde Baru juga dikekang, surat izin terbit hanya dapat diperoleh setelah memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku. Surat izin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak sejalan dengan kehendak pemerintah, akibatnya pers tidak berani menyiarkan informasi yang fakta dan kritis (Harahap, 2000: 223-224).

Pada kedua masa di atas, pers sengaja dijadikan alat oleh pemerintah. Pemerintah sengaja mengendalikan pers demi kepentingannya, tujuan pemerintah mengendalikan pers karena pada dasarnya pers berada di posisi yang tidak berdaya untuk menentang kehendak pemerintah, sehingga fungsinya tidak lebih dari sekedar mengiyakan kehendak pemerintah. Untuk mengendalikan pers, pemerintah bertindak sebagai pembatas. Pemerintah langsung melakukan pembatasan-pembatasan ketika pers dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah (Harahap, 2000:261).

Tidak adanya kebebasan pers pada kedua masa di atas merupakan pertanda bahwa sistem pemerintahan yang berlaku pada kedua masa itu bukanlah demokrasi, karena kebebasan pers termasuk pilar demokrasi yang utama. Pasca Orde Baru, ruang lingkup kebebasan pers tidak dapat dibendung dengan semakin adanya kemajuan teknologi komunikasi. Kini telah lahir *media online* sebagai salah satu jenis *cybercom* di mana peristiwa, komentar dan analisis peristiwa dapat disiarkan ketika sedang berlangsung. Kehadiran *media online* atau koran maya, jelas telah merubah paradigma kebebasan pers karena berita yang muncul tidak disiarkan beberapa menit, jam, hari atau minggu akan tetapi, begitu terjadi langsung di *upload* ke dalam situs *media online* (Harahap, 2000: 225).

Hubungan antara Pers Pemerintah dan Masyarakat harus berlangsung harmonis dan menyadari hak dan kewajiban masing-masing, khususnya mengenai hubungan antara Pers dan Pemerintah yang posisinya tidak boleh saling berhadapan dan tidak berat sebelah sehingga pers dikendalikan oleh pemerintah. Kedepannya pers diharapkan menjadi mitra pemerintah. Pers Indonesia mulai merasakan kebebasannya di tahun 1998, setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Setiap orang dapat mendirikan institusi media sebagai wujud dari demokratisasi yang dijalankan Indonesia. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi menjadikannya suatu lembaga yang syarat

dengan distribusi kekuasaan baik politik maupun ekonomi, karena media dianggap sebagai salah satu alat kontrol sosial masyarakat dan juga pembentuk opini. Para pemilik kuasa mulai membangun kerajaan media, dengan memiliki beberapa perusahaan media, mulai dari media cetak, televisi, hingga portal berita *online* (Putra, 2013:121).

Pada tahun 2000, Surya Paloh pemilik Media Group, mendirikan Metro TV. Metro TV merupakan televisi berita 24 jam pertama di Indonesia. Visi dan Misi yang diusung oleh Metro TV adalah untuk tumbuh sebagai televisi yang mencerdaskan bangsa dan mengawal proses demokrasi di Indonesia, dengan menyajikan tayangan yang membuat masyarakat mampu menilai situasi dan kondisi bangsa, sehingga publik akan memiliki wawasan dan keberanian untuk mengontrol dan menyuarakan kesenjangan (Putra, 2013:121).

NasDem pada saat itu merupakan partai yang masih baru dan tentu saja membutuhkan sebuah media untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat. NasDem menggunakan Metro Tv sebagai alat untuk menyampaikan visi misinya kepada masyarakat, melalui iklan dan banyaknya pemberitaan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Surya Paloh dengan NasDemnya. Kegiatan promosi dari NasDem berupa iklan dan pemberitaan di Metro Tv semakin lama semakin melebihi batas proporsi, iklan Nasional Demokrat lebih sering ditayangkan termasuk pidato-pidato Surya Paloh yang ditayangkan lebih lama dari pidato Presiden atau politisi-politisi penting lainnya (Putra, 2013:122).

Pada 8 November 2000, Surya Paloh mengundang Presiden RI Abdurrahman Wahid untuk meresmikan pendirian Metro Tv sebagai sebuah stasiun berita pertama di Indonesia. Seminggu kemudian, 25 November 2000 menjadi hari yang bersejarah karena pada hari tersebut Metro Tv memulai on air untuk pertama kalinya, ia menyajikan siaran berita selama 18 jam

setiap hari dengan dukungan teknologi yang full digital. Pada tanggal 1 April 2001, Metro Tv siaran non stop selama 24 jam setiap hari (Keller, 2009:69).

Metro TV pada 20 Mei 2010 bertepatan dengan hari kebangkitan nasional, meluncurkan identitas korporat baru dan tagline baru, yang diwujudkan dalam sebuah grand launching bertajuk “Bangkit Bangsaku”. Hal ini merupakan bentuk dari *rebranding* Metro Tv yang mempromosikan identitas korporat serta visi misi yang tertuang dalam sebuah tagline baru “*Knowledge to Elevate*”. Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan proses *rebranding* yang dilakukan oleh Metro TV, Surya Paloh yang merupakan pemilik Metro TV mengikrarkan pembentukan Organisasi Masyarakat (Ormas) Nasional Demokrat (Nasdem) (Putra, 2013:121).

Sebagai televisi berita pertama di Indonesia, liputan media Metro Tv juga ikut menggunakan Teori “*CNN Effects*” yaitu untuk membantu menjelaskan dampak media ketika meliput krisis politik, bencana kemanusiaan, dan bencana alam (Bintang, 2015: 29).

Secara perlahan Metro Tv akan memberikan efek terhadap penonton yang melihat berita seputar kejadian yang di atas dan hal tersebut akan menguras emosi juga air mata, tidak hanya itu saja namun bantuan uluran tangan baik berupa uang dan bantuan lainnya juga berhasil didapatkan lewat *CNN Effects*, yang pada akhirnya kepercayaan publik akan berpihak kepada mereka. Hadirnya Metro Tv membuat masyarakat memberikan kepercayaan penuh terhadap berita yang *up-to date*, baik tentang kondisi ekonomi, sosial, budaya, serta keadaan pemerintah di Indonesia maupun mancanegara. Metro Tv menjadi satu-satunya televisi berita pertama di hati masyarakat yang hadir untuk memenuhi kebutuhan informasinya, keadaan inilah yang membuat Metro Tv mengambil kesempatan untuk mempromosikan kegiatan atau instansi apa yang dimiliki Surya Paloh.

Seperti yang sudah sering dilakukan Media Indonesia dan Metro TV, mereka enggan memberitakan keterlibatan pemiliknya Surya Paloh dalam kredit macet Bank Mandiri. Namun, apabila *viral* mereka yang sedang terlilit kasus maka dengan sigap dan cepat mereka langsung memberitakannya. Para media yang dimiliki oleh konglomerat tidak memberitakan keterlibatan pemilik mereka dalam berbagai kasus. Melemahnya fungsi kontrol jurnalistik makin meluas akibat konsentrasi kepemilikan media. Pada akhirnya media juga mengontrol banyak informasi dan produk media dan mereka akan menghasilkan banyak keuntungan. Mereka sangat efisien dalam memproduksi informasi dan menyebarkannya melalui jaringan media seperti televisi, radio dan media cetak dalam satu perusahaan yang mereka miliki (Fahrudin, 2013: 83).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, Paloh sebagai pemilik media kerap kali menggunakannya untuk kepentingan pribadi, baik untuk Yayasan yang ia miliki maupun meningkatkan citra dirinya dan partai politiknya. Sang pemilik media memiliki akses untuk mengontrol konten yang dimasukkan ke dalam tayangan yang akan dipublikasikan kepada masyarakat, seringkali mereka masukan konten yang menguntungkan bagi pihaknya dan sangat jarang mereka membahas info yang akan menjatuhkan citra mereka. Mereka menjadikan Metro Tv dan media yang mereka miliki lainnya sebagai alat yang digunakan untuk menarik simpatik dan menghegemoni masyarakat untuk memengaruhi pandangan masyarakat akan berita atau info yang ditayangkan. Sehingga dengan adanya tayangan yang mempersuasif itu, masyarakat memiliki kepercayaan yang erat dengan Metro Tv dan berita lainnya, namun belakangan ini masyarakat Indonesia sudah menunjukkan dan memiliki sikap kritis untuk memilih tayangan yang baik untuk dikonsumsi.

Pada akhirnya, mereka para konglomerat semakin kaya dan dapat membeli dan membentuk dunia politik dengan menggunakan medianya. Mereka secara perlahan mengatur

perubahan gaya hidup yang diyakini menjadi tren masa kini dan diakui keberadaannya. Logika media memberikan gambaran bagaimana politik dan kehidupan bermasyarakat harus berjalan beriringan, media berubah menjadi sistem dari segala kebutuhan dan ia akan memerintah dan berkuasa (Thaniago, 2015: 9).

C. Tim Kemanusiaan Surya Paloh (Yayasan Sukma)

Dilansir melalui website resmi yayasan-sukma.org, tertera tulisan “Sumbangan Masyarakat Melalui Dompot Kemanusiaan Indonesia Menangis”. Hal ini menjadi sesuatu yang kembali mengingatkan kita kepada kemampuan televisi untuk mengumpulkan dana publik dalam peristiwa Tsunami di Aceh pada 2004. Peristiwa ini diliput besar-besaran oleh Metro Tv, momen yang sangat diingat masyarakat Indonesia pada saat itu adalah ketika Najwa Shihab melakukan reportase secara langsung sambil menangis. Momen tersebut dimanfaatkan Metro Tv untuk mendorong keprihatinan penduduk Indonesia, hal ini menjadi strategi yang mampu mempromosikan aktifitas Metro Tv untuk mengumpulkan dana lewat tayangan yang diberikan. Hingga akhirnya, dalam waktu seminggu Metro Tv berhasil menggalang dana hingga 40 miliar rupiah melalui program “Indonesia Menangis” (Heychael dan Thaniago, 2013:1).

Selama 40 hari penuh lewat siaran “*Breaking News*” dan program “Indonesia Menangis”, Metro Tv berhasil menguras air mata pemirsa di luar Aceh. Hal tersebut rupanya mendapatkan respon yang cepat oleh masyarakat untuk menyumbangkan harta benda maupun uang mereka, bahkan ada pula yang menjadi sukarelawan setelah menonton beritanya. Kabar duka ini tersiar hingga ke mancanegara, selang berapa pekan 15 negara donor sepakat menyatukan bantuan mereka dalam Dana Multi Donor bagi Aceh dan Nias, sebesar 525 juta dolar AS, tak ketinggalan pula Bank Pembangunan Asia mengucurkan dana 300 juta dola AS (Bintang, 2006)

Surya Paloh dengan sigap menggelar rapat untuk membentuk tim, ia juga menghubungi beberapa koleganya di maskapai penerbangan seperti Lion Air, Adam Air, Airfast dan beberapa maskapai lainnya juga. Hasil bantuan berupa pangan dan sandang membanjiri kantor Media Group di Jakarta, secara bertahap bantuan ini mulai mengalir ke Aceh. Selain membuka peluang bantuan melalui “Indonesia Menangis”, mereka juga membuka rekening di Bank Central Asia dan Bank Mandiri yang kurang dari sepekan sudah terkumpul 40 miliar lewat rekening yang dicantumkan. Secara cepat, Metro Tv mendapatkan bantuan dari masyarakat di peringkat pertama apabila dibandingkan televisi swasta lainnya yang juga membuka bantuan penggalangan dana untuk Aceh, mereka mendapatkan Rp 169,185 miliar dari pemirsa yang memberikan bantuannya melalui saluran rekening pihak Metro Tv (Bintang, 2006)

Dalam buku Galang Dana Ala Media yang diterbitkan Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) pada 2003, terbukti bahwa media televisi menempati urutan pertama untuk menggaet simpati pemirsa. Alasannya sederhana, pesan lewat media lebih mampu mengeksplorasi dan mengeksploitasi rasa kemanusiaan publik. Pasca tsunami di Aceh, kondisi permukiman warga porak-poranda dan masih ada sekitar 67.500 orang yang mengungsi di tenda darurat. Selain itu diperkirakan sedikitnya 50 ribu orang masih menempati barak yang disediakan dan warga selebinya memilih untuk menumpang di rumah sanak saudara. Wilayah Aceh sangat membutuhkan pembangunan rumah dan perbaikan jalan, kondisi ini membuat Surya Paloh berencana mendirikan sebuah yayasan guna membantu masyarakat (Bintang, 2006)

Awal Mei 2005, dana program bantuan “Indonesia Menangis” senilai Rp 134,028 miliar yang dikumpulkan dari pemirsa diserahkan kepada Yayasan Sukma. Alasan resmi Yayasan Sukma tertera pada laporan kegiatan kemanusiaan ”Indonesia Menangis Media Group” yang dimuat Media Indonesia pada 4 Mei 2005: “agar seluruh pengelolaan dana sumbangan

masyarakat melalui Dompot Kemanusiaan Indonesia Menangis dapat berjalan lebih efektif dan dikelola secara lebih profesional untuk jangka panjang”, Namun tak banyak penyumbang yang tahu soal rencana dan penyerahan dana “Indonesia Menangis” ke Yayasan Sukma. Pada akhirnya semua terkuak, bahwa Yayasan Sukma yang didirikan Surya Paloh merupakan hasil dari dana yang disumbangkan untuk warga Aceh-Nias yang pada saat itu membutuhkan bantuan (Bintang, 2006)

Pada 15 Februari 2005, Paloh bersama Lestari Moerdijat, Ana Widjaya, Rahmi Lohwur dan Rachmadi Heru mendirikan Yayasan Sukma, nantinya yayasan ini akan bergerak dalam bidang kemanusiaan, sosial dan keagamaan. Surya Paloh membentuk struktur organisasi dan menduduki posisi sebagai Pembina, sementara itu Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai ketua yayasan. Kursi penasehat diduduki oleh Hasballah M. Saadyang pernah menjadi Menteri Negara Hak Asasi Manusia di era Gus Dur, Komaruddin Hidayat ditunjuk sebagai ketua majelis pendidikan yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Program Pendidikan Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Jakarta dan yang terakhir adalah Ahmad Baedowi yang diberikan posisi sebagai Ketua Tim Pelaksana Pendidikan di Yayasan Sukma (Bintang, 2006).

Dalam website resmi salah satu Sekolah Sukma Bangsa di Aceh menjelaskan, Yayasan Sukma berpartisipasi dengan pemerintah setempat untuk kembali membangun pendidikan di Aceh. Yayasan Sukma membangun sekolah di Aceh di beberapa kabupaten diantaranya; Pidie, Bireun, dan Lhoksmawe, dan satu sekolah lainnya di Nias, Sumatera Utara. Alasan utama yang fundamental adalah aspek jangka panjang kegunaan dana masyarakat yang terhimpun melalui Program Indonesia Menangis di Metro Tv. Menyangkut pendirian sekolah di Aceh ini akan berorientasi terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Satu poin penting yang harus ditekankan adalah, bahwa pembangunan sekolah didedikasikan bagi

pengembangan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, nilai-nilai lokal Aceh yang identik dengan keislaman dan keindonesiaan menjadi landasan penting bagi sekolah ini.

Dilansir melalui web Filantropi Indonesia, dalam website resminya di filantropi.or.id, Yayasan Sukma telah terdaftar menjadi salah satu organisasi pendidikan nasional yang bergerak dalam program diantaranya; menggalang dana/hibah dari pihak lain untuk pendanaan program organisasi. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan yang lebih fokus kepada ranah SD, SMP, SMA. Yayasan Sukma ini didirikan sebagai tanggapan terhadap bencana tsunami yang melanda aceh 2004 silam, lokasi dari program yang dibentuk sejauh ini meliputi wilayah Aceh, dan Nias. Yayasan Sukma bekerja untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) dan kemajuan Kemampuan Manusia dan Sumber Daya Manusia. Yayasan ini mementingkan kepada dunia pendidikan guna membangun Aceh kembali, yayasan ini ingin memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar dan membangun masa depan mereka. Kegiatan pelatihan guru dan pertukaran antara sekolah membantu guru untuk memahami kebutuhan siswa dan memberikan pengalaman yang berbeda untuk membentuk karakter guru yang berkualitas.